

# PENGEMBANGAN MODEL INKUBATOR PERDESAAN BERBASIS KAWASAN MELALUI SINERGITAS “BIG” (BUSINESS, INTELLECTUAL, GOVERNMENT) DALAM RANGKA PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU DI KABUPATEN MALANG

---

**Submission date:** 06-May-2023 08:00AM (UTC+0700)  
by Umu Khourouh

**Submission ID:** 2085558170

**File name:** Artikel\_Jurnal\_Manajemen\_dan\_Kewirausahaan..pdf (293.07K)

**Word count:** 6386

**Character count:** 41541

**PENGEMBANGAN MODEL INKUBATOR PERDESAAN BERBASIS  
KAWASAN MELALUI SINERGITAS “BIG” (BUSINESS,  
INTELLECTUAL, GOVERNMENT) DALAM RANGKA PENCIPTAAN  
WIRAUSAHA BARU DI KABUPATEN MALANG**

**Umu Khourah  
Yuntawati Fristin**

Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Malang

**Abstract :** *The main objective of this research is to develop a model-based incubator rural areas through synergy "BIG" (Business, Intellectual and Government) in order to create new entrepreneurs. The focus of this research is growth of new entrepreneurs through the development of local resource-based inter-related areas that have the potential to be developed to meet the needs of a sustainable society. The determination is based on the unity of the resources that have similar resources specification, interrelated, dependent and geographic proximity. To achieve this goal, the research methods are designed by using descriptive research method, policy research and applied research. The results of analyzes of the DEA method shows that the agricultural sector is the most efficient. The sub-sector of agriculture commodities are sugar cane, vegetables and chili. Based on the evaluation of the obstacles, challenges, program and policy development of the rural incubator models that focus on the development of rural economy BUMDes as an institution is needed in order to make the country more self-reliant and prosperous. The pattern of intervention that is needed is an increase in the ability of human resources, economic empowerment and institutional capacity and support the development of rural infrastructure. Various activities such as mapping the potential urge and village profiles in an attempt to determine the potential of local resources to support the development of enterprises, the establishment of incubators, BUMDes Development, manufacturing and business development matrix of new venture creation more prospective.*

**Key words:** *Incubator, Synergy 'BIG', BUMDes Development.*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Malang memiliki potensi sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang sangat besar serta bervariasi, seperti pertanian, kehutanan, kelautan/perikanan, peternakan dan perkebunan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 15,44 persen (49.519 hektar) merupakan lahan sawah, 30,77 persen (98.685 hektar) adalah tegal/ladang/kebun, 6,11 persen (19.578 hektar) adalah areal perkebunan dan 2,91 persen (9.325 hektar) adalah hutan. Rata-rata produktivitas lahan sawah 66,66 Kw/ha dengan produksi pada tahun 2010 mencapai 450.685 ton. Sedangkan dari sektor perikanan, produksi

ikan tangkapan yang dihasilkan setiap tahunnya Sekitar 84,00 persen (9.100,82 ton) produksi ikan merupakan hasil tangkapan laut, 13,44 persen hasil budidaya dan 2,56 persen hasil penangkapan di perairan umum. (Kabupaten Malang dalam Angka 2011).

Besarnya potensi sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Malang, dalam kenyataannya belum diikuti dengan terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan Data BPS, jumlah rumah tangga miskin pada sebesar 155.745 KK atau 610.605 jiwa (24,95%) dari total jumlah penduduk 2.447.051 jiwa dengan jumlah pengangguran sebesar 59.000 jiwa (2,41%). Dari data kemiskinan tersebut sebagian besar

4 penduduk miskin berada di wilayah perdesaan yang menggantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumberdaya alam dalam kegiatan ekonominya sebagai petani.

Permasalahan kemiskinan dan pengangguran yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Penanggulangan kemiskinan memerlukan perubahan yang bersifat sistematis dan menyeluruh karena penanganannya selama ini cenderung parsial di masing-masing sektor dan tidak berkelanjutan. Selain itu kebijakan untuk memacu penciptaan wirausaha dan pertumbuhan usaha yang hendak dirumuskan setidaknya harus beranjak untuk memperbaiki kekeliruan dalam pembinaan yang selama ini banyak dilakukan yang disebabkan oleh (1) tidak adanya partisipasi lokal dalam merancang pola intervensi yang dilakukan (2) kaburnya ukuran-ukuran keberhasilan (3) terlalu fanatik pada ideologi top-down (4) tidak adanya lembaga sosial lain yang ada dalam aktivitasnya (5) pola pembinaan yang tumpang tindih (6) gagal menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat lokal (7) belum mampu memberikan jaminan kesinambungan, utamanya disebabkan kurang adanya *social acceptance* sehingga proses transfer pembinaan tidak dapat terkelola secara baik (Sukardi, 2006). Demikian juga model pendekatan yang dilandaskan untuk menyantuni kelemahan industri kecil terbukti tidak cukup efektif untuk mendorong usaha ini berkembang secara mandiri.

Efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja secara terpadu dan berkelanjutan akan tercapai jika dirumuskan *strategic plan* yang mengintegrasikan setiap kepentingan dalam keseimbangan antar dimensi ekologis, sosial, sektoral, disiplin ilmu dan segenap pelaku pembangunan untuk mengelola SDA dan SDM. Pembangunan memiliki dua obyek yakni bagaimana memanfaatkan *human resources* dan *natural resources* secara efektif dan efisien. Pentingnya pemanfaatan SDA secara optimal melalui pemanfaatan sumber daya lokal akan menciptakan

lapangan pekerjaan guna mengurangi pengangguran.

Dalam konteks penelitian, sumberdaya lokal dimaknai sebagai segala sumberdaya yang bernilai ekonomis yang ada di lokasi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang berkelanjutan (*sustainable livelihoods*). Penentuan kawasan didasarkan pada sebuah kesatuan sumberdaya yang memiliki spesifikasi sumberdaya yang sejenis, saling berkaitan, memiliki ketergantungan dan kedekatan geografis. Dalam upaya mendukung prinsip pengembangan sumberdaya dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, maka pengembangan sumberdaya lokal berbasis kawasan dilaksanakan berdasarkan: (1) produk spesifik kawasan, (2) karakteristik sumberdaya kawasan, (3) dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, (4) mempunyai keterkaitan yang kuat antar sumberdaya, (5) kebutuhan saat ini dan yang akan datang terhadap produk dan jasa lingkungan, (6) dilakukan atas dasar partisipatif serta keberpihakan pada yang lemah.

Selain itu, isu penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah melakukan upaya pengembangan kemampuan kewirausahaan dan pemenuhan teknologi yang memadai dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha agar mampu mengakses pasar, informasi, keuangan dan manajemen. Gnyawali dan Fogel, 1994, menjelaskan bahwa ada hubungan antara pengembangan kewirausahaan dengan keadaan lingkungannya. Penelitian tentang hal ini pada umumnya dilakukan dalam porsi kecil-kecil, tersebar di mana-mana, dan banyak bersifat deskriptif (Vesper, 2002, Agung NF, 1996). Gnyawali dan Fogel (1994) mengembangkan suatu model yang menjelaskan hubungan antara berbagai faktor terkait dengan kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut yaitu: *opportunity*, *ability to enterprise*, *propensity to enterprise*, *likelihood to enterprise*, dan *new venture creation*. Pemahaman hubungan

kewirausahaan dan lingkungannya akan dapat digunakan dalam menyusun strategi pengembangan kewirausahaan di Indonesia.

Pengembangan ekonomi berarti meningkatkan temuan dan inovasi dengan berbagai cara yang mampu mengkaitkan strategi transfer teknologi dan kemampuan kewirausahaan dari tingkat lokal sampai global dengan memberdayakan individu-individu pelaku bisnis. Transformasi dari suatu inovasi ke pasar ditentukan oleh kemampuan perusahaan melakukan filterisasi terhadap kesempatan dan permintaan pasar dari inovasi tersebut. Tingkat ketersediaan teknologi dan kendala perusahaan itu sendiri dalam mengakses teknologi merupakan faktor penentu utama ketersediaan teknologi bagi pengusaha dan dunia usaha. Pada sisi inilah yang seringkali terjadi permasalahan, dimana kapasitas pengusaha mengalami kendala dalam mengakses produk riset dan teknologi atau kemampuan menggunakan teknologi relatif kurang efektif karena kendala keteknikan dan syarat financial terhadap penggunaan produk riset atau teknologi tersebut.

Oleh karena itu, agar pemanfaatan *human resources*, *natural resources* dan sumber daya lainnya dapat berjalan secara efektif dan efisien terutama dalam upaya penumbuhan wirausaha baru diperlukan wadah untuk memediasi dan memfasilitasi para pelaku bisnis melalui proses pendampingan, konsultasi, fasilitasi, dan bimbingan. Wadah kegiatan tersebut adalah inkubator bisnis. Lembaga inkubator adalah salah satu alternatif guna memediasi transfer teknologi yang menjembatani antara kebutuhan pengusaha dan mengalirkan arus informasi dan hasil riset dan teknologi sesuai dengan kebutuhan nyata dan dirasakan serta bernilai pasar, serta menjalin hubungan kolaboratif sinergis dengan lembaga sumber riset dan teknologi.

Asumsi mendasar suatu inkubator adalah bahwa pelaku usaha memiliki keterbatasan kemampuan mencari peluang bisnis, sehingga diperlukan upaya memediasi dan memfasilitasi para pelaku bisnis melalui proses pendampingan, konsultasi, fasilitasi,

dan bimbingan dalam kegiatan inkubasi. Transfer pengetahuan dan teknologi melalui inkubator merupakan suatu proses perubahan budaya yang menjembatani perubahan norma, sikap, dan perilaku penggunanya sekaligus menjadi hasil nilai baru/budaya baru dari proses transfer dinamika pengetahuan dan teknologi tersebut. Proses penyajian informasi dan transfer teknologi secara tepat ditujukan memberi manfaat bagi proses pengembangan ekonomi dan bisnis. Melalui rangkaian kegiatan tersebut memungkinkan kesiapan usaha maupun 'business start-up' menjadi lebih baik dari segi perilaku dan kelembagaan bisnisnya.

Inkubator bisnis dapat didudukkan sebagai suatu mediator berbentuk relasi keterkaitan, katalistik, maupun intervening antar lembaga riset, pemerintah, dan universitas dengan masyarakat pengusaha (*Business, Intellectual and Government*). Secara potensial dan aktual, media inkubator bisnis diharapkan dapat meningkatkan akselerasi, aksesibilitas dan afordabilitas proses alih teknologi, difusi inovasi, adaptasi teknologi yang mendekatkan produk riset dan teknologi yang dihasilkan dan memang nyata dibutuhkan oleh pengusaha pengguna. Apabila hal ini dilakukan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukanlah mimpi yang tak terwujud.

## METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini merupakan kombinasi dari penelitian deskriptif, *policy research* dan *applied research*. Unit analisis adalah 1) para pengusaha sebagai acuan penumbuhan wirausaha baru; 2) Masyarakat sebagai obyek penumbuhan wirausaha baru dan 3) stakeholder yang terkait sebagai pendukung penumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Malang dengan kerangka sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu para pelaku usaha dari masing-masing sector penyumbang PDRB. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan dalam masing-masing tahapan adalah sebagai berikut : 1) identifikasi dan analisis kegiatan penumbuhan wirausaha baru yang telah dilakukan dan aspek-aspek lainnya yang

saling terkait; 2) melakukan identifikasi dan analisis profil ekonomi kawasan guna mengetahui potensi ekonomi kawasan dan sumbangan masing-masing sektor usaha dalam PDRB. Selanjutnya menghitung tingkat efisiensi masing-masing sektor; 3) Indept interview atau wawancara mendalam dengan sampel pelaku usaha dari sektor usaha. Selanjutnya kemudian dilakukan *focus group discussion* (FGD) untuk mencari alternatif solusi secara bersama – sama dengan berbagai pihak terkait di daerah tersebut. FGD ini diharapkan bisa memberikan masukan dalam memformulasi kebijakan dan langkah pengembangan prototype model inkubator perdesaan dengan karakteristik kawasan guna menciptakan wirausaha baru serta penyiapan berbagai materi penunjang uji coba model inkubator perdesaan.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Potensi Sumber Daya Manusia**

Jumlah penduduk di tiga desa lokasi penelitian adalah sebesar 7.891 jiwa untuk Desa Blayu, 6.363 jiwa untuk Desa Kidangbang dan Desa Sukoanyar yang paling sedikit sebesar 6.221 jiwa. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, desa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi dengan kepadatan diatas 2.099 jiwa/km<sup>2</sup> berada di Desa Bayu dan terendah adalah Desa Kidangbang dengan tingkat kepadatan 1.268 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan Desa Sukoanyar 1.417 jiwa/km<sup>2</sup>.

Keluarga miskin di tiga desa lokasi penelitian relatif masih cukup besar. Pada tahun 2011 jumlah keluarga miskin di Desa Blayu sebesar 688 keluarga atau 34,7 persen dari jumlah seluruh keluarga yang ada. Keluarga miskin di Desa Kidangbang sebesar 954 keluarga (47,8 persen). Sedangkan di Desa Sukoanyar jumlah keluarga miskin sebesar 837 keluarga atau 47,5 persen.

Ditinjau dari aspek pendidikan, sebagian besar masyarakat di ketiga desa lokasi penelitian berpendidikan rendah. Masyarakat dengan tingkatan pendidikan tamat SD/MI di Desa Blayu 15,6 persen, Desa Kidangbang 15 persen dan Desa

Sukoanyar 12,9 persen. Sedangkan yang tidak tamat SD/MI di Desa Blayu 12,3 persen, Desa Kidangbang 12,4 persen dan Desa Sukoanyar 11,7 persen bahkan masih banyak penduduk usia 10 tahun ke atas yang buta huruf di Desa Blayu 12,2 persen, Desa Kidangbang 12,8 persen dan Desa Sukoanyar 11,7 persen. Sedangkan tingkat Pengangguran menunjukkan bahwa pengangguran yang ada di Blayu 22,8%, Kidangbang 10,7% dan Sukoanyar 13,2%.

Mata pencaharian penduduk di ketiga desa lokasi penelitian terdistribusi pada 4 sektor besar yaitu pertanian dan perkebunan, perdagangan, industri dan jasa. Sedangkan sebagian dari pekerja yang bekerja di pabrik dan industri merupakan pekerja pada industri kecil dengan jumlah terbanyak adalah industri anyaman/gerabah/keramik. Bagi pekerja yang bekerja di sektor jasa, jumlah unit usaha jasa yang ada di Desa Blayu 9 unit, Desa Kidangbang 10 unit dan Desa Sukoanyar 19 unit. Untuk mendukung seluruh kegiatan perekonomian yang ada di ketiga desa tersebut, sarana prasarana yang tersedia adalah toko/warung/kios, asuransi, warung makan, koperasi.

### **Potensi Ekonomi**

Bidang pertanian unggulan meliputi tanaman pangan, sayuran, hortikultura dan perkebunan. Unggulan tanaman pangan di wilayah Kabupaten Malang lebih didominasi oleh komoditi jagung, padi, ketela pohon, ubi jalar, dan kacang-kacangan. Dari sektor tanaman pangan padi masih menjadi primadona baik sebagai mata pencaharian maupun sebagai kontributor dalam peningkatan pendapatan. Dilokasi penelitian, produktivitas padi cukup besar. Hasil produksi untuk Desa Blayu sebesar 490 ton, Desa Kidangbang sebesar 368 ton dan Desa Sukoanyar sebesar 900 ton. Dengan harga perkuintal sebesar Rp 340.000,- maka penerimaan masyarakat Desa Blayu dari tanaman padi sebesar 1,67 milyar, Desa Kidangbang 1,25 milyar dan Desa Sukoanyar sebesar 3,06 milyar.

Palawija juga menjadi isu penting dalam ketahanan pangan dan agroindustri.

Agroindustri berbasis palawija cukup prospektif berdasarkan pengalaman industri. Hasil palawija terbesar adalah jagung dan ubikayu. Hasil jagung untuk Desa Blayu sebesar 360 ton, Desa Kidangbang 160 ton dan Desa Sukoanyar sebesar 40,6 ton. Dengan harga Rp 3760 per kg maka pendapatan dari tanaman jagung untuk Desa Blayu sebesar 1,35 milyar, Desa Kidangbang sebesar 601,6 juta dan Desa Sukoanyar sebesar 152,51 juta. Sedangkan untuk ubikayu Desa Blayu menghasilkan 36 ton dan Desa Sukoanyar menghasilkan 10,6 ton. Dengan harga ubikayu sebesar Rp 1.830 per kg maka pendapatan dari ubikayu untuk Desa Blayu sebesar 65,88 juta dan untuk Desa Sukoanyar sebesar 18,85 juta.

Selain hasil pertanian, masyarakat juga mengusahakan sayuran dan buah-buahan. Untuk sayuran didominasi oleh kubis, tomat, sawi dan buncis. Selain itu masyarakat juga menanam buah-buahan seperti nangka, alpukat, jambu dan jenis buah-buahan lainnya. Untuk tiga desa kajian jenis buah-buahan yang ada di Desa Blayu adalah buah salak dengan hasil produksi sebanyak 2,5 ton. Desa Kidangbang menghasilkan buah pepaya dengan hasil produksi sebanyak 18,2 ton. Sedangkan di Desa Sukoanyar jenis buah yang dihasilkan adalah buah jeruk siam dengan hasil produksi sebanyak 3,5 ton dan buah pepaya sebanyak 7 ton.

Hasil perkebunan terbesar adalah tebu dan kelapa. Hasil tebu yang dihasilkan dari tiga desa lokasi penelitian adalah sebesar 145 ton untuk Desa Blayu, 238,5 ton untuk Desa Kidangbang dan Desa Sukoanyar sebesar 189 ton. Dengan harga Rp 9.900 per kg, maka pendapatan dari tanaman tebu sebesar 1,44 milyar, Desa Kidangbang sebesar 2,36 milyar dan Desa Sukoanyar sebesar 1,87 milyar.

Sektor peternakan juga merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam peningkatan pendapatan keluarga. Sebaran ternak yang ada di tiga lokasi penelitian untuk Desa Blayu adalah berturut dari yang terbanyak adalah ayam buras, ayam petelur, kambing, itik/entok, sapi dan kuda. Desa Kidangbang ayam buras, ayam petelur, itik/entok, kambing, sapi

pedaging, sapi perah dan kuda. Desa Sukoanyar ayam petelur, ayam buras, itik/entok, sapi pedaging, kambing, sapi perah dan kuda.

Secara keseluruhan sektor peternakan khususnya unggas di Kabupaten Malang telah memberikan sumbangan pendapatan perkapita sebesar Rp 5.918.359,- per kapita/th yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu Rp 5.517.255,-. Fakta ini cukup memberikan bukti bahwa sektor peternakan menjadi peluang yang menjanjikan untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Hasil perikanan yang tersedia adalah hasil perikanan darat dari kolam dan mina padi. Sedangkan untuk tiga desa lokasi penelitian hasil perikanan yang ada adalah lele dan mujair. Ssektor industri yang menjadi unggulan adalah industri kerajinan tikar mendong, tamper mendong dan industri pengolahan keju.

#### **Kontribusi Sektor Usaha**

Secara umum, kontribusi sektor usaha pembentuk PDRB di Kecamatan Wajak di dominasi oleh sektor pertanian. Dengan kondisi alam di ketiga desa telah mengantarkan sektor pertanian secara umum menjadi penyumbang Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB) terbesar yaitu hampir 45% dari Produk Domestik Desa Bruto (PDDDB). Unit usaha di dominasi oleh sektor pertanian dengan unit usaha 75% dari seluruh unit usaha sektor penyumbang PDRB, berturut-turut oleh sektor industri sebesar 11,7%, perdagangan 9,1%, pengangkutan 3,4% dan sisanya tersebar disektor lainnya. Sedangkan dari serapan tenaga kerja sektor pertanian juga mendominasi dengan serapan tenaga kerja sebesar 61,5% dari seluruh tenaga kerja pada sektor penyumbang PDRB, diikuti berturut-turut oleh sektor industri sebesar 21,5%, Jasa lainya 7,9%, perdagangan 4,7% dan sisanya tersebar disektor lainnya.

Dengan luas area pertanian hampir mencapai 80,1% (302,5 Ha) dari luas Desa Blayu, 63,9% (321 Ha) dari luas Desa Kidangbang dan 66,3% (290,6 Ha) dari luas Desa Sukoanyar telah menjadikan potensi ekonomi diketiga desa tersebut didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Sektor

pertanian dan perkebunan yang banyak ditekuni oleh masyarakat di ketiga desa adalah padi, jagung, tebu, sayur, cabe, mendong dan rumput taman. Masyarakat di ketiga desa penelitian semua mengusahakan kegiatan bertanam padi, jagung, tebu dan sayur. Hal yang menjadi ciri khas masing-masing desa adalah tanaman mendong di Desa Blayu, rumput taman di Desa Kidangbang dan Cabe di Desa Sukoanyar. Hasil masing-masing jenis usaha menunjukkan bahwa sub sektor pertanian yang menghasilkan produktivitas terbesar di Desa Blayu adalah dari padi, jagung dan sayur. Desa Kidangbang yang menghasilkan produktivitas terbesar adalah padi, tebu dan jagung sedangkan di Desa Sukoanyar yang menghasilkan produktivitas terbesar adalah Cabe, padi dan tebu.

Adapun jenis komoditi unggulan selain padi yang ada di ketiga desa lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

**Tabel 1 : Komoditi Unggulan Desa Kajian**

Desa	Komoditi Unggulan	Jumlah Petani	Luas Area	Hasil
Blayu	Sayur	80	25 Ha	375 ton
Kidangbang	Tebu	125	53 Ha	238,5 Ton
Sukoanyar	Cabe	191	95,5 Ha	1.050,5 Ton

Sumber: RPJMDes dan Profil Tiga Desa Diolah, 2011

### **Kebutuhan Pengembangan Usaha Penumbuhan Wirausaha Baru**

#### **Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 13 orang (22%) dan laki-laki sebanyak 47 orang (78%). Sedangkan dari jenis pekerjaan responden menunjukkan bahwa 23 orang (38%) responden memiliki pekerjaan sebagai petani, 11 orang (18%) sebagai pedagang, 10 orang (16%) sebagai pengrajin dan sisanya tersebar di pekerjaan peternak, industri, buruh, bengkel dan perikanan. Responden dari petani berasal dari petani padi, cabe, jeruk, mendong, tebu, tomat dan rumput taman.

Dari pengrajin sebagian besar adalah pengrajin tamper mendong, sisanya tikar mendong dan tamper sapi. Dari pedagang sebagian besar adalah toko kelontong,

pedagang sayur keliling dan sisanya adalah "ngijon" (pengepul hasil pertanian) dan pedagang kerajinan tikar. Dari sektor peternakan terdistribusi ke tiga jenis kegiatan peternakan yaitu ternak sapi perah, ayam broiler dan kelinci. Sektor industri berasal dari industri batu bata dan bakso. Dari sektor perikanan berasal dari perikanan budidaya ikan lele dan mina mendong. Sisanya dari buruh terdistribusi ke buruh bangunan, kerajinan dan bengkel.

Lama usaha disamping menunjukkan seberapa tinggi kemampuan pekerjaan yang dilakukan dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat juga menunjukkan tingkat kemampuan teknis maupun manajerial dari responden. Dari hasil analisis terhadap lama usaha menunjukkan bahwa 13,3% responden menekuni pekerjaan kurang dari 5 tahun. Hal ini berarti responden mencoba mengembangkan kemampuan usahanya melalui diversifikasi usaha maupun memulai usaha baru yang memberikan peluang untuk meningkatkan pendapatan. 68,3% telah menekuni pekerjaan antara 5-10 tahun dan sisanya 18,3% lebih dari 10 tahun. Pekerjaan yang sekian lama ditekuni ini merupakan pekerjaan turun temurun yang keahliannya diwariskan dari nenek moyang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap modal usaha, responden yang menggunakan modal usaha dari 3 juta sebanyak 48,3%, antara 3 juta sampai 6 juta sebanyak 36,7% dan lebih dari 6 juta sebanyak 15%. Sedangkan dilihat dari sisi pendapatan responden sebagian besar pendapatan bersih yang diperoleh sebesar kurang lebih Rp 1.000.000,- per bulan. Pendapatan terbesar diperoleh para pelaku usaha yang berprofesi sebagai pengepul (Ngijon) yang mendapat Rp 4.000.000 – 5.000.000 per bulan.

Tingkat persaingan yang dihadapi oleh masing-masing responden bergantung pada jenis pekerjaan yang ditekuni. Persaingan tinggi dihadapi oleh para petani, kerajinan, dan peternakan. Sedangkan yang cukup rendah adalah dari sektor industri dan pengepul. Rata-rata penyerapan tenaga kerja secara keseluruhan sebesar 2 orang tenaga kerja tetap tiap jenis pekerjaan. Sedangkan

untuk tenaga kerja serabutan yang diperlukan pada saat ada kegiatan berkisar antara 2 – 3 orang. Kondisi ini menunjukkan tenaga kerja relatif stabil.

Dari jumlah responden sebagian besar telah dapat mengakses permodalan dan hanya 33,3% yang belum pernah mendapatkan kucuran modal usaha. Adapun sumber permodalan yang diakses sebagian besar dari UPK yang ada di masing-masing desa. Hanya 3 orang yang mendapatkan kucuran modal usaha dari bank yaitu BRI, Bank Jatim dan BPR. Adapun jumlah kredit yang diberikan sebagian besar memperoleh kredit Rp 2.000.000,- dari UPK yang ada (47,5%), 27,5% kurang dari Rp 2.000.000,- dan 25% mendapatkan kredit lebih dari Rp. 2.000.000,- bahkan ada yang mencapai Rp 8.000.000,- - Rp 10.000.000,-.

Sejauh ini kegiatan mengembangkan kemampuan melalui kegiatan pembinaan untuk pemberdayaan UMKM banyak dilakukan dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM namun tidak banyak menyentuh para responden. Dari jumlah responden hanya 7 orang (11,7%) yang pernah mendapatkan pembinaan dari dinas terkait maupun institusi lainnya. Adapun lembaga yang memberikan pembinaan adalah dari Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas Pertanian, kemitraan dan dari perguruan tinggi.

#### ***Kondisi Usaha***

Dalam aspek peluang usaha sebagian besar responden, 43,3% menyatakan bahwa peluang usaha yang mereka tekuni baik, 30% menyatakan sangat baik, 18,3% cukup baik dan 8,3% tidak baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sampai saat ini usaha yang ditekuni masih memberikan harapan untuk dikembangkan. Bahkan sebagian besar responden 53,3% menyatakan bahwa merespon peluang usaha penting dan 46,7% menyatakan sangat penting bagi berkembangnya usaha mereka. Hasil ini membuktikan bahwa upaya untuk memunculkan wirausaha baru juga diperlukan kemampuan menciptakan peluang dan merespon peluang.

Untuk menjaga kelangsungan usaha dukungan bahan baku dan kelancaran proses

produksi merupakan hal yang mutlak diperlukan. Hasil analisis tentang ketersediaan bahan baku dan proses produk diketahui bahwa 51,7% menyatakan baik, 21,7% sangat baik, 18,3% cukup baik dan 8,3% tidak baik. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mendorong meningkatkan ketersediaan bahan baku dan proses produksi agar kelangsungan usaha dapat terjamin.

Kemampuan finansial responden dalam mengembangkan usaha menunjukkan bahwa 38,3% dari mereka menyatakan memiliki sumber daya yang baik untuk mengembangkan usaha bahkan 48,3% menyatakan sangat baik. Namun hasil analisis juga menunjukkan bahwa kurang lebih 13,3% masih menghadapi permasalahan permodalan.

Kegiatan pemasaran menunjukkan bahwa 48,3% berjalan dengan baik, 33,3% bahkan sangat baik dan sisanya cukup baik dan tidak baik. Hal ini bisa dimaklumi mengingat pasar yang dilayani hanya pasar lokal yang berada disekitar daerah mereka. 18,3% yang kegiatan pemasarannya masih kurang diperlukan upaya untuk meningkatkan penjualan baik melalui kegiatan promosi melalui kegiatan eksebisasi maupun memperluas wilayah pemasaran.

Dari aspek sumber daya manusia para responden menunjukkan bahwa 43,3% menyatakan mempunyai sumber daya manusia yang baik dalam menjalankan usaha. Namun 53,3% masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia karena masih dalam kategori cukup baik, tidak baik dan sangat tidak baik. Hasil penelitian tentang berbagai kendala dalam pengembangan usaha yang ditinjau dari aspek peraturan, infrastruktur, akses permodalan, SDM, pemasaran dan teknologi menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih terdapat banyak hambatan yang dihadapi. Hambatan tertinggi dihadapi dari aspek peraturan-peraturan yang ada sekarang masih dianggap belum mendukung tidak baik 81,7%, yang menyatakan cukup baik 8,3% dan yang menyatakan baik 10%. Demikian juga halnya dengan kondisi infrastruktur yang dianggap tidak baik 55%, dianggap baik 35%. Aspek teknologi menduduki hambatan

terbesar ketiga dengan 51,7% . Selanjutnya SDM dan pemasaran masing-masing 43,3%. Akses permodalan menjadi satu-satunya yang dirasa tidak begitu menghambat karena 58,3% menyatakan baik, cukup baik 6,7%.. Realita ini menunjukkan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk membantu UKM dalam upaya mengembangkan usaha.

#### ***Analisis Kebijakan Pengembangan Dan Penumbuhan Wirausaha Baru***

Dengan mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010-2015, maka strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Malang dilakukan dengan mendorong pertumbuhan melalui peran investasi dan peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi ; yang bertumpu pada sektor bidang andalan yaitu : pertanian pangan, perkebunan, peternakan, industri dan perdagangan dan jasa sebagai pengungkit dan pendorong serta memacu bidang potensi yaitu : kelautan, pertambangan, pariwisata dan air bersih.

Sedangkan kebijakan dan program dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang adalah melalui peningkatan daya saing industri melalui pematapan usaha mikro, kecil dan menengah dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah. Berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan lokus pada Dinas Koperasi dan UKM dituangkan dalam berbagai program/kegiatan antara lain : 1) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM; 2) Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM 3) Program peningkatan kelembagaan koperasi.

Ditingkatkan desa, dalam rangka memberdayakan masyarakat dan mengembangkan usaha ekonomi produktif, bidang pemberdayaan masyarakat desa melakukan program antara lain melalui: 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan dan kerjasama 2) Kerjasama dengan lembaga masyarakat, tokoh agama,

13  
tokoh masyarakat Peningkatan ekonomi produktif masyarakat dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan; Fasilitasi kerjasama permodalan dengan lembaga keuangan baik pemerintah maupun swasta. Serta Pengadaan tempat-tempat industri untuk menciptakan lapangan kerja.

#### ***Evaluasi terhadap Program Pemerintah dalam Pengembangan UMKM***

Hasil evaluasi terhadap seluruh program pemerintah dalam pengembangan UMKM yang terangkum dalam 4 indikator utama yaitu sinergi, sinkronisasi dan koordinasi, pengorganisasian kegiatan, pelaksanaan program, serta peran instansi dalam mengembangkan UKM dan penumbuhan wirausaha baru menunjukkan masih jauh dari yang diharapkan. 62,7% responden menilai aspek sinergi, sinkronisasi dan koordinasi, 66% responden menilai aspek pengorganisasian kegiatan, 59,7% responden menilai aspek pelaksanaan program dan 43,3% responden menilai peran instansi dalam mengembangkan UKM dan penumbuhan wirausaha baru tidak baik.

#### ***Evaluasi Potensi dan Permasalahan dalam Pengembangan UKM di Tiga Desa Kajian***

Hasil evaluasi terhadap kondisi SDA menunjukkan banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti lahan pertanian dan perkebunan yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal; kondisi wilayah sangat baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing, bebek, dan ternak lain, mengingat banyaknya pakan untuk jenis ternak tersebut, sedangkan bidang usaha ini baru menjadi usaha sampingan; banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing, memungkinkan untuk dikembangkan usaha pembuatan pupuk organik; adanya usaha perikanan air tawar dan rencana menjadi kawasan Minapolitan.

Potensi Sumber Daya Manusia yang bisa dimanfaatkan adalah siklus dan ritme kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur; hubungan yang baik dan kondusif antara kepala desa, pamong desa, dan masyarakat merupakan publik

*sphere* yang ideal untuk terjadinya pembangunan desa; cukup tingginya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pembangunan desa. besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga; ada sebagian petani mempunyai kemampuan bertani secara modern dengan menerapkan pola tanam yang baik dan menggunakan alat pertanian Tehnologi Tepat Guna; adanya sektor unggulan seperti aneka kerajinan yaitu kerajinan bambu, kerajinan meubel, kerajinan Gifsum, kerajinan tikar serta keberadaan organisasi kepemudaan, organisasi kesenian dan kelompok-kelompok pertanian, kelompok perikanan dan kelompok tahlil, memudahkan dalam berkoordinasi setiap kegiatan pembangunan.

### Hambatan dan Tantangan

Beberapa hambatan yang dihadapi adalah; 1) keadaan sebagian sarana infrastruktur penunjang perekonomian masih belum memadai; 2) kurangnya penguasaan teknologi pertanian sehingga menyebabkan kurang maksimalnya hasil pertanian dan pengolahan hasil pertanian dan perkebunan; 3) kemampuan SDM juga masih rendah sehingga masyarakat sulit mengembangkan usaha; 4) Rendahnya kualitas pendidikan sehingga kurang mampu bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun membuka dan menciptakan lapangan baru; 5) minimnya perhatian terhadap pemasaran dan permodalan; 6) masih minimnya pelatihan, workshop, dan kursus untuk meningkatkan kemampuan usaha warga karena belum optimalnya peran pemerintah dalam membangun sektor usaha dan dalam melakukan pembinaan; 7) Struktur pasar yang tidak kondusif bagi petani jumlah petani yang jauh lebih banyak dari pada pedagang dan tidak terorganisir dengan baik, menyebabkan posisi petani menjadi lemah. Harga komoditi banyak ditetapkan sepihak oleh pedagang; 8) Belum adanya kelembagaan ekonomi atau belum optimalnya fungsi kelembagaan ekonomi yang ada untuk mengorganisir petani maupun pelaku usaha lainnya dalam

satu wadah yang kuat untuk menjamin kepastian harga; 9) Pemanfaatan potensi desa dalam pengembangan ekonomi produktif masih sangat terbatas. Oleh sebab itu dukungan pembinaan dan pembiayaan sangat dibutuhkan untuk membimbing masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga tercipta ketahanan ekonomi rumah tangga yang lebih mantap.

## PEMBAHASAN



**Gambar 1. Model Inkubator Perdesaan Berbasis Kawasan Melalui Sinergi “BIG”**

Pembagian peran masing-masing stakeholders dalam model tersebut adalah sebagai berikut :

### 1. Kelompok Tani, Petani, Pelaku Usaha, Masyarakat

Sebagai obyek dan subyek Masyarakat memegang peran yang sangat penting (pemegang kunci) dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Partisipasi tersebut dibutuhkan tidak hanya dalam pelaksanaan program, namun sejak diagnosis masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Program pemberdayaan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, sehingga manfaatnya segera dapat dirasakan.

### 2. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)

Lembaga ekonomi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan memperluas kesempatan kerja dengan menciptakan diversifikasi usaha adalah BUMDes, lembaga ekonomi milik desa yang berbentuk korporasi. BUMDes berperan mulai dari sektor hulu sampai

hilir. Dengan kata lain BUMDes pada dasarnya merupakan upaya konsolidasi dan terpadu untuk penguatan lembaga ekonomi perdesaan. Hal-hal penting yang harus dilakukan BUMDes sebagai basis kekuatan ekonomi perdesaan adalah : a) meningkatkan kapasitas masyarakat, b) mengintegrasikan produk ekonomi di perdesaan agar memiliki posisi tawar yang baik dalam jaringan pasar, c) mengelompokkan masyarakat dalam kelompok usaha sejenis agar tercipta skala ekonomis, d) meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi desa, e) menyediakan modal melalui skim kredit mikro dan f) menjangkau informasi pasar dan menjalin komunikasi dengan pihak luar. Dengan demikian secara bertahap dan sistematis kekuatan ekonomi perdesaan akan muncul menuju kemandirian.

### 3. Dukungan Pihak Eksternal

Fakta di berbagai kasus dan daerah menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan dukungan berupa pendampingan yang berperan sebagai fasilitator, katalisator, dinamisor pembangunan dan memberi bimbingan teknis lainnya. Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah perlu didukung oleh sumberdaya yang lain seperti pemerintah, perguruan tinggi dan dunia usaha. Para pengusaha dapat menjalin kemitraan dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha, melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan seperti sub-kontrak, wara laba, inti-plasma, dan pola-pola kemitraan lainnya. Selain itu dapat dikembangkan program kemitraan yang didorong karena kepedulian perusahaan besar untuk membina perusahaan kecil, khususnya usaha mikro dan kecil. Pola kepedulian perusahaan besar dalam bentuk social ini disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dukungan Lembaga keuangan dapat diberikan melalui pemberian fasilitas permodalan. Untuk itu perlu diupayakan

pendekatan baru perbankan terhadap UMKM, salah satunya melalui Kelompok Simpan Pinjam (KSM) maupun kelompok usaha. Dengan pendekatan kelompok diharapkan memudahkan pengelolaan kredit dan dapat menekan risiko sehingga secara keseluruhan menjadi layanan kredit yang ekonomis. Selain itu untuk membantu mengurangi risiko kredit macet, Bank dapat melakukan pendampingan usaha bagi kelompok UMKM yang mengambil kredit. Pendekatan ini memang ini butuh waktu dan pemikiran lebih, sehingga untuk meringankan risiko dapat bekerjasama dengan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), yaitu model konsultan keuangan yang sekarang banyak didorong untuk berkembang dalam rangka memfasilitasi akses UMKM terhadap permodalan. Jadi sinergitas didalam pemberdayaan UMKM menjadi kunci penentu dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing.

Peran pemerintah dalam mengembangkan UMKM maupun lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha UMKM itu sendiri, pengembangan akses ke lembaga pasar lokal, domestik dan global. Bahkan lebih luas lagi berbagai peran yang diharapkan dari pemerintah adalah: 1) Menciptakan peluang pasar lokal, domestik dan global sebagai respon terhadap perkembangan yang ada; 2) Melakukan terbosan dalam pengembangan teknologi sistem produksi, pengolahan dan pemasaran; 3) Menguatkan dan mengaktifkan jalinan hubungan secara kemitraan antar pelaku dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran; 4) Melakukan identifikasi sumberdaya yang potensial secara lebih intensif; 5) Menciptakan produk yang memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan perguruan tinggi memiliki peran sebagai konsultan pengembang usaha dalam berbagai aspek yaitu : manajemen, pasar dan pemasaran bahkan

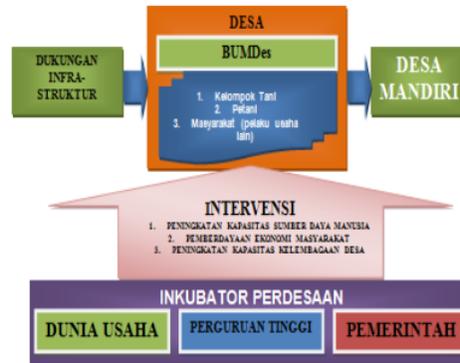
sampai fasilitasi dalam menghubungkan UMKM ke lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lebih luas Peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan UMKM harus mampu melakukan upaya-upaya strategis yang bermanfaat dalam bentuk yang lebih operasional antara lain melalui: 1) Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang relevan bagi kebutuhan masyarakat UMKM dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis; 2) Mengembangkan pusat-pusat pengembangan masyarakat UMKM dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang ada; 3) Membantu pengembangan kebijakan strategis terhadap legislatif dan eksekutif serta mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan tentang UMKM tersebut; 4) Menghidupkan atau mendorong lembaga-lembaga independen diberbagai level daerah untuk mengimbangi inkorporasi negara yang selama ini masuk kedalam hampir semua sektor kehidupan masyarakat, baik di pusat maupun daerah 5) Menyebarluaskan (*dissemination*) berbagai informasi yang masih menjadi masalah yang dihadapi UMKM melalui berbagai cara (*public education*) agar kelompok-kelompok masyarakat mempunyai kemampuan adaptif menyongsong era otonomi daerah.

**Mekanisme Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Inkubator Perdesaan**

Secara potensial dan aktual, media inkubator bisnis diharapkan dapat meningkatkan akselerasi, aksesibilitas dan afordabilitas proses alih teknologi, difusi inovasi, adaptasi teknologi yang mendekatkan produk riset dan teknologi yang dihasilkan dan memang nyata dibutuhkan oleh pengusaha pengguna.

Inkubator bisnis melakukan analisis kebutuhan nyata dari para pengusaha binaan atau calon binaan melalui upaya menghimpun dan menyaring informasi mengenai kebutuhan mereka atau menyajikan berbagai temuan dan hasil yang

ada kepada para pengusaha binaan (tenant) dengan berbagai spesifikasinya yang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas pengusaha binaan tersebut. Berdasarkan analisis kebutuhan yang diperoleh dari masyarakat selanjutnya menentukan pola intervensi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan pemenuhan kebutuhan para pengusaha binaan.



**Gambar 2. Intervensi Inkubator Perdesaan**

Beberapa intervensi yang dapat dilakukan oleh inkubator perdesaan adalah sebagai berikut:

**1. Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia**

Pembinaan inkubasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan pengenalan dan pengembangan kemampuan inovasi kepada pengusaha binaan. Inkubator bisnis memahami dan menyelami kemampuan maupun kapasitas pengusaha binaan, sehingga proses belajar yang bersifat kontinu dan intensif antara pengusaha binaan dan pihak inkubator menciptakan suasana belajar yang efektif dan lancer sehingga mendorong adanya kedekatan pemahaman dan tindakan guna mencapai tujuan proses inkubasi bisnis dan keberhasilan usaha yang dilakukan oleh para tenant.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Inkubator bisnis melakukan proses binaan merangsang tenant mencari dan menerapkan inovasi secara terus menerus yang mendukung keberhasilan usaha. Proses pendampingan dan konsultasi yang dilakukan inkubator bisnis dalam aspek manajerial bisnis, diharapkan memberikan nilai tambah dan manfaat ekonomi bagi para tenant dan inkubator bisnis secara mutualistik.

## **3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa**

Peningkatan kapasitas kelembagaan desa menjadi penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan serta dapat membantu mewujudkan pemerintahan desa yang bersih dan akuntabel menuju good governance. Kelembagaan yang baik akan merubah tata hubungan, terutama hubungan kekuasaan, melalui proses dialogis interaktif berdasarkan kesetaraan dan keadilan.

## **4. Pembangunan Infrastruktur**

Program pembangunan infrastruktur pada dasarnya adalah pembangunan sarana prasarana yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, pelayanan sosial kemasyarakatan, meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan peningkatan kualitas SDM.

Melalui berbagai pola intervensi diatas serta dukungan pembangunan infrastruktur pendukung ekonomi menjadi masyarakat desa sejahtera dan desa menjadi desa yang mandiri.

## **Model Pemasaran Dalam Pengembangan Usaha Di Desa**

Skema pemasaran dalam pengembangan ekonomi desa dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. BUMDes sebagai lembaga ekonomi milik desa melalui unit pemasaran akan menjadi pelaku utama dalam pemasaran komoditi yang dihasilkan masyarakat. Unit ini

menjalankan fungsi pemasaran mulai dari pembelian, pengumpulan hasil, serta memasarkan hasil.

2. Kelompok tani, petani maupun masyarakat dapat menjual dan mengumpulkan setiap komoditi yang dihasilkan melalui BUMDes untuk dipasarkan.
3. Untuk memudahkan pembinaan dan menciptakan skala usaha yang ekonomis BUMDes dapat melakukan kontrak dengan petani, kelompok tani maupun masyarakat pelaku usaha lainnya. Kontrak tersebut dapat dijadikan jaminan untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pasokan kepada lembaga pemasaran berikutnya.
4. Dalam memasarkan produk BUMDes dapat menyalurkan langsung ke perusahaan maupun lembaga pemasaran daerah yang dibentuk oleh kabupaten untuk memfasilitasi pemasaran seluruh komoditas yang dihasilkan masyarakat dibawah BUMDes.
5. Lembaga Pemasaran Daerah dapat memasarkan komoditi yang dihasilkan masyarakat ke pasar lelang, terminal agribisnis yang dikembangkan di beberapa daerah untuk melayani tidak hanya perdagangan regional tapi juga ekspor.

## **Kegiatan Pengembangan Dan Penumbuhan Wirausaha Baru Kabupaten Malang**

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Malang berupa : 1) Standarisasi kualitas produk 2) Peningkatan kapasitas SDM dan kapasitas manajerial melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan-pelatihan dan pendampingan; 3) Bantuan permodalan melalui pemanfaatan fasilitas dari pemerintah; 4) peningkatan manajemen pemasaran melalui pengembangan sarana pemasaran produk, promosi dan pameran produk, penyediaan sarana promosi produk unggulan dan potensi daerah dan penyelenggaraan pameran investasi, pameran produk unggulan daerah dan pembinaan mutu produk, penyuluhan pemasaran, 5) Akses informasi melalui penyusunan potensi daerah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan

arah dan terpadunya kegiatan agropolitan, minapolitan dan UMKM, penyebar luasan informasi bursa kerja guna meningkatkan upaya penempatan tenaga kerja dan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan. penyusunan data base industri kerajinan guna fasilitasi pengembangan usaha. data potensi unggulan daerah, penyelenggaraan pameran investasi dan penyusunan sistem informasi penanaman modal daerah untuk memudahkan akses informasi penanaman modal; 6) Kemitraan melalui fasilitasi kerjasama dengan daerah yang berbatasan, fasilitasi kerjasama antar daerah dan dengan dunia usaha/lembaga, forum investasi. temu kemitraan; 7) Bantuan sarana prasarana internal dan eksternal serta peningkatan teknologi produksi yang dibutuhkan untuk pengembangan ukm yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait

#### **PENUTUP**

Jenis UMKM yang ada di Kabupaten Malang yang tersebar memberikan gambaran bervariasi karakteristik usaha yang ada, demikian juga dengan problematikanya. Kegiatan UMKM memiliki karakteristik problem yang jauh lebih rumit mengingat berbagai keterbatasan yang dihadapi oleh usaha tersebut seperti permodalan, rendahnya kemampuan SDM baik dilihat dari tingkat pendidikan maupun kemampuan teknis dan bisnis yang dimiliki, rendahnya kreativitas dan inovasi, keterbatasan akses permodalan, keterbatasan akses pasar dan daya saing serta permasalahan-permasalahan klasik lainnya. Permasalahan UMKM adalah suatu permasalahan yang bersifat multidimensi, sehingga membutuhkan keterpaduan faktor dalam mengkaji sisi ekonomi, kelembagaan, sosial maupun permasalahan yang diakibatkan faktor struktural. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap keragaman kegiatan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat di desa kajian serta evaluasi terhadap program dan kegiatan dalam pengembangan usaha, maka dirumuskan suatu model inkubator perdesaan berbasis kawasan melalui sinergitas "BIG" (*Business, Intellectual, Government*) dalam rangka penciptaan wirausaha baru di Kabupaten

Malang. Berbagai kegiatan yang mendesak antara lain pemetaan potensi dan profil seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Malang sebagai upaya untuk mengetahui potensi sumber daya lokal yang menjadi penunjang dalam pengembangan usaha, pembentukan inkubator, pembuatan matrik pengembangan usaha dan penciptaan usaha baru yang lebih prospektif. Untuk itu maka upaya pemberdayaan dan penciptaan kemandirian dalam berusaha membutuhkan bantuan dan koordinasi semua pihak baik instansi vertikal – horizontal maupun lembaga perguruan tinggi. Pelibatan para pengusaha dalam penyusunan program pemberdayaan dan penciptaan kemandirian usaha juga bagian yang terpenting dalam rangka membumikan program nantinya. Demikian juga tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya pemberdayaan dan penciptaan kemandirian usaha. Sehingga ketiganya diharapkan mampu menjadi desa menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Nur Fajar (1996). *The Business Talent and Indonesian Entrepreneurs Personality*. Fourth Asia Pacific Conference on Giftedness. Hotel Horison, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (2011), Kabupaten Malang Dalam Angka. BPS Kab. Malang.
- Buku Pedoman Manajemen Sederhana Usaha Kecil dari Departemen Koperasi dan PPK, 1994
- Gnyawali, Devi R. and Daniel S. Fogel (1994). *Environment for Entrepreneurship Development: Key Dimension and Research Implications*. *Entrepreneurship: Theory and Practice*.
- Gray, Colin, 2002, Entrepreneurship Resistance to Change and Growth in Small Firm, Emerald Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 9, Number 1.

- Kesepakatan bersama Menko Kesra Selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia, tentang Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Nomor 11/KEP/MENKO/KESRA/IV/2002 – Nomor 4/2/KEP.GBI/2002
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/39/PBI/2005 Tanggal 18 Oktober 2005 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Profil Desa Blayu, 2011. Desa Blayu Kec. Wajak Kab. Malang.
- Profil Desa Kidangbang, 2011. Desa Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang.
- Profil Desa Sukoanyar, 2011. Desa Sukoanyar Kec. Wajak Kab. Malang.
- Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015, Bappekab Malang.
- Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Blayu 2010 – 2015, Kab Malang.
- Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Kidangbang Tahun 2010 – 2015 Kab. Malang.
- Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Sukoanyar Tahun 2010 – 2015, Kab. Malang.
- Soetrisno, Noer. (2003). *“Kewirausahaan Dalam Pengembangan UMKM di Indonesia”*. *Ekonomi Kerakyatan Dalam Kancah Globalisasi*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKMK
- Sukardi, (2004), *Pendekatan Diagnostik Case Study dalam mendisain Kebijakan Pembinaan Industri Kecil Di Kawasan Indonesia Timur*, Jurnal Kebijakan Publik: Publisia, Volume 8, Nomor 3, Desember 2004, hal 165.
- Vesper. (2002). *New Venture Strategies*. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

# PENGEMBANGAN MODEL INKUBATOR PERDESAAN BERBASIS KAWASAN MELALUI SINERGITAS “BIG” (BUSINESS, INTELLECTUAL, GOVERNMENT) DALAM RANGKA PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU DI KABUPATEN MALANG

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://de.scribd.com">de.scribd.com</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://malangkab.sip-ppid.net">malangkab.sip-ppid.net</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://jurnal.stie.asia.ac.id">jurnal.stie.asia.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://www.bapemas.jatimprov.go.id">www.bapemas.jatimprov.go.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://www.jurnalmudiraindure.com">www.jurnalmudiraindure.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://ukm2016.wordpress.com">ukm2016.wordpress.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://jsp.fp.unila.ac.id">jsp.fp.unila.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.unmer.ac.id">jurnal.unmer.ac.id</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://botemsweety.wordpress.com">botemsweety.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
10	<a href="http://cermee.desa.id">cermee.desa.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://faculty.petra.ac.id">faculty.petra.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://jdih.bpk.go.id">jdih.bpk.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://karangdurencity.blogspot.com">karangdurencity.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://lppm.ipb.ac.id">lppm.ipb.ac.id</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

# PENGEMBANGAN MODEL INKUBATOR PERDESAAN BERBASIS KAWASAN MELALUI SINERGITAS “BIG” (BUSINESS, INTELLECTUAL, GOVERNMENT) DALAM RANGKA PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU DI KABUPATEN MALANG

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

**/0**

GENERAL COMMENTS

**Instructor**

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14